



Pengaruh Anggaran dan Realisasi terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2022

Ade Mulyadi Amri¹, Zulkieflimansyah², Ahmad Yamin³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: zulkieflimansyah@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-02 Keywords: <i>Budget; Local Revenue; Realization; Financial Performance.</i>	The purpose of this study is to analyze the effect of revenue budget and realization on regional financial performance at the West Sumbawa Regency Government for the 2018-2022 period. This research is a mix method research, namely quantitative, with data analysis using descriptive and verification approaches. The data used in this study are revenue data and realization of the West Sumbawa Regency Government in 2018-2022. The Validity Test and Reliability Test conducted in this study used the Multiple Regression analysis method, while the calculation of revenue used revenue ratio analysis and financial performance. The results showed that the regional revenue of West Sumbawa Regency experienced significant fluctuations from year to year. There was a decrease in revenue in 2019 and 2020, but it was followed by strong growth in 2021 and 2022, then financial performance in the West Sumbawa Regency Government in 2022 recorded a very high financial performance, with a significant increase in the budget to 1,116,451,228,327 rupiah and a very high realization reaching 1,494,739,533,955 rupiah, resulting in a financial performance of 134%, and there is a significant influence between budget and realization simultaneously on the financial performance of the West Sumbawa Regency government. This study concludes that, when the realization matches or even exceeds the budget, this shows the organization's ability to manage financial resources effectively. Effective budget management and achieving good realization can also increase public or stakeholder trust in the organization.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-02 Kata kunci: <i>Anggaran; Pendapatan Daerah; Realisasi; Kinerja Keuangan.</i>	Tujuan dari penelitian Ini adalah untuk menganalisis pengaruh anggaran pendapatan dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat periode 2018-2022. Penelitian ini merupakan penelitian mix methode yaitu kuantitatif, dengan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan dan realisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018-2022. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi berganda, sementara perhitungan pendapatan menggunakan analisis rasio pendapatan dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Terdapat penurunan pendapatan pada tahun 2019 dan 2020, namun diikuti oleh pertumbuhan yang kuat pada tahun 2021 dan 2022, kemudian kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 mencatat kinerja keuangan yang sangat tinggi, dengan peningkatan signifikan dalam anggaran hingga 1.116.451.228.327 rupiah dan realisasi yang sangat tinggi mencapai 1.494.739.533.955 rupiah, menghasilkan kinerja keuangan sebesar 134%, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran dan realisasi secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, ketika realisasi sesuai atau bahkan melebihi anggaran, hal ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Pengelolaan anggaran yang efektif dan pencapaian realisasi yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau stakeholder terhadap organisasi.

I. PENDAHULUAN

Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat permasalahan terkait anggaran. Meskipun target perencanaan anggaran yang tinggi ditetapkan, namun realisasi anggaran cenderung rendah

dalam satu tahun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran, yang tidak mencerminkan transparansi, akuntabilitas, ekonomi, efektivitas,

dan efisiensi yang diharapkan (Akbar, 2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi luas kepada daerah dengan tujuan untuk dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta partisipasi aktif mereka. Perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat (Ariani, 2016).

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerahnya (Gunawan, 2016). Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi publiknya sangat tergantung pada kemampuannya dalam mengelola anggaran dan melaksanakan realisasi program-program yang telah direncanakan. Menurut Ismail (2019), kinerja keuangan daerah menjadi sangat relevan untuk dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Susanto, 2020). Kinerja keuangan daerah yang baik dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien, dan telah menggunakan sumber daya keuangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerahnya (Khodacheck, 2017).

Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah (Smith, 2018). Alasannya adalah bahwa semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula kualitas otonomi daerah (Lee, 2021). Tetapi pada kenyataannya banyak daerah yang mempunyai keterbatasan dari penerimaan asli daerahnya, sehingga menyebabkan bantuan pusat berupa subsidi masih cukup dominan dalam APBD (Marlina, 2018). Fenomena ketergantungan daerah terhadap pusat mempunyai implikasi fiskal yang signifikan, yaitu ketergantungan keuangan daerah kepada pusat yang sangat tinggi. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap sumbangan pemerintah pusat masih sangat besar karena peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui peningkatan

Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Pemerintah Kabupaten cenderung mengharapkan bantuan yang lebih besar dari tahun ke tahun karena sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dijadikan andalan sumber penerimaan terbesar dalam APBD.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 ini, sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pertama, hasil pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh warga setempat. Kedua, hasil dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketiga, berbagai jenis pendapatan lainnya seperti penjualan kekayaan daerah tak terpisahkan, jasa giro, pendapatan bunga bank atau investasi lainnya, selisih nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing serta komisi atau potongan akibat penjualan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Di bawah ini adalah tabel data mengenai Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sah pada tahun 2018-2022 di Kabupaten Sumbawa Barat:

Tabel 1. Laporan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun Anggaran	Anggaran (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2018	67.459.906.728,00	838.302.218.000,00	39.479.884.707,00
2019	76.439.053.980,00	796.027.536.000,00	70.670.184.707,00
2020	132.520.890.972,00	652.936.534.909,00	43.824.011.227,00
2021	149.647.402.917,00	799.848.287.698,00	47.436.067.330,00
2022	140.183.935.954,00	768.905.386.894,00	65.730.463.856,00

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Dari data yang tertera dalam Tabel 1, dapat diamati bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada periode 2018-2022 mengalami variasi antara tahun-tahunnya. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang masih efisien dan efektif dalam mengelola dana perimbangan. Menurut Kuswandi (2016) terkait dengan hal ini, penting untuk mencatat bahwa fluktuasi dalam Dana Perimbangan tidak selalu mengindikasikan ketidakstabilan atau kegagalan dalam kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, fluktuasi tersebut dapat mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan nasional yang memengaruhi besaran dana yang dialokasikan ke daerah. Pemerintah pusat mungkin mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam menentukan alokasi dana perimbangan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional pada setiap

Analisis rasio terhadap realisasi APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menilai realisasi

otonomi daerah (otda). Otda adalah kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya (Djayasinga, 2015). Kebijakan ini seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otda, menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Berikut adalah data mengenai anggaran dan juga realisasi penerimaan berdasarkan penerimaan selama tahun 2018-2022:

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2018-2022

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2018	67.459.906.728,00	66.810.357.000,00
2019	76.439.053.980,00	72.869.945.142,29
2020	132.520.890.972,00	119.961.988.394,16
2021	149.647.402.917,00	141.792.639.534,35
2022	140.183.935.954,00	127.904.141.675,47

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran KSB, 2023

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 1.2 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama periode 2018 hingga 2022, realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat cenderung mengalami keterlambatan jika dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Penelitian tentang pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah penting dilakukan untuk memahami bagaimana kedua faktor tersebut berinteraksi dan berdampak pada kondisi keuangan suatu daerah (Bastian, 2016). Dalam konteks Kabupaten Sumbawa Barat, penelitian ini sangat relevan mengingat potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah tersebut. Beberapa permasalahan penting yang melatarbelakangi penelitian ini seperti, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan salah satu tujuan utama pembangunan daerah, pengelolaan anggaran yang baik akan membantu mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian daerah, dengan memahami pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan, serta membantu pemerintah daerah mengatasi tantangan tersebut melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh anggaran dan realisasi.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara anggaran dan realisasi

terhadap kinerja keuangan daerah, diharapkan Kabupaten Sumbawa Barat dapat meningkatkan pengelolaan keuangan mereka dan mencapai kinerja keuangan yang lebih baik secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi kemampuan Pemerintah Kab. Sumbawa Barat dalam mengelola keuangan daerah dengan judul penelitian "Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2022".

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, di mana informasi diperoleh melalui penggunaan angka sebagai alat evaluasi dalam strategi penelitian kuantitatif. Proses analisis data statistik juga merupakan bagian penting dari metode ini (Suliyanto, 2018). Metode kuantitatif dipilih karena masalah yang dihadapi sangat jelas dan merupakan penyimpangan yang seharusnya tidak terjadi, seperti ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, serta rencana dengan pelaksanaan. Dalam penelitian ini, penggunaan data sekunder lebih diutamakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara kriteria penarik sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran dinas penghasil di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018-2022. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam laporan realisasi anggaran dinas penghasil di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018-2022, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi, seperti yang dijelaskan oleh Santoso (2012), merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan kategorisasi dan klasifikasi bahan tertulis yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan

menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio.

2. Analisis Statistik

Menurut Sugiyono (2018), analisis statistik adalah metode untuk mengolah data yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan interpretasi. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam analisis ini, fokus diberikan pada hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Beberapa teknik dalam analisis statistik meliputi, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Anggaran dan Realisasi

Realisasi PAD mencerminkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam mengimplementasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas kinerja daerah dapat dikategorikan jika rasio realisasi minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio realisasi, semakin baik kemampuan daerah tersebut. Anggaran Pemerintah KSB dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio realisasi PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 3. Anggaran PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

No	Tahun	Anggaran (Rp)
1	2018	1.078.258.497.606
2	2019	1.076.772.471.257
3	2020	1.017.061.795.452
4	2021	1.064.990.890.165
5	2022	1.116.451.228.327

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Terlihat bahwa anggaran PAD mengalami fluktuasi selama periode lima tahun tersebut. Anggaran PAD tertinggi tercatat pada tahun 2022, yaitu sekitar 1.116,5 triliun rupiah,

sementara anggaran terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sekitar 1.017,1 triliun rupiah. Meskipun ada fluktuasi, anggaran PAD secara umum mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat dalam meningkatkan pendapatan daerah. Perubahan anggaran PAD ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, perubahan kebijakan, dan kondisi daerah yang berubah dari tahun ke tahun.

Tabel 4. Realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2018	1.085.140.803.316
2	2019	1.020.871.750.858
3	2020	947.824.890.407
4	2021	1.057.787.974.513
5	2022	1.494.739.533.955

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan pendapatan daerah Kab. Sumbawa Barat menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Ada tahun-tahun dengan penurunan pendapatan, seperti tahun 2019 dan 2020, yang kemudian diikuti oleh tahun-tahun dengan pertumbuhan yang kuat, seperti tahun 2021 dan 2022. Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan jumlah yang hampir mencapai 1.495 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan pendapatan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahun tersebut dan realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2020, dengan jumlah sekitar 947,8 triliun rupiah pada tahun ini pemerintah KSB sedang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, pertumbuhan ekonomi, dan juga perubahan dalam struktur pendapatan daerah dapat memengaruhi fluktuasi dalam realisasi PAD selama periode yang diamati.

Tabel 5. Perhitungan Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018-2022

No	Tahun	Efektifitas (%)
1	2018	101%
2	2019	95%
3	2020	93%
4	2021	99%
5	2022	134%

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas, terdapat fluktuasi rasio penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kab. Sumbawa Barat selama lima tahun terakhir (2018-2022). Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (99% - 93%), dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang lebih signifikan yaitu sebesar 35% (134%-99%). Namun, selebihnya rasio penerimaan PAD mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 6% (95% -101%) dan pada tahun 2020 sebesar 2% (93%-95%). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menghadapi tantangan dalam mempertahankan konsistensi pertumbuhan pendapatan daerah. Meskipun ada peningkatan yang signifikan pada beberapa tahun tertentu, namun ada juga periode di mana rasio penerimaan PAD menurun. Dalam rangka mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan fluktuasi tersebut. Strategi pengelolaan keuangan yang efektif serta diversifikasi sumber pendapatan mungkin diperlukan agar daerah dapat menjaga tren positif dalam jangka panjang.

B. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil mencapai hasil keuangan yang telah direncanakan, termasuk anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran dalam bentuk rasio keuangan (Bastian, 2016). Semakin tinggi rasio kinerja daerah tersebut, semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal seperti pemerintah pusat dan provinsi, dan sebaliknya. Untuk menghitung kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilakukan sebagai berikut: (Khusaini, 2018)

$$\text{Kinerja Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio kinerja keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun Anggaran 2018-2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja Keuangan (%)
1	2018	1.078.258.497.606	1.085.140.803.316	101%
2	2019	1.076.772.471.257	1.020.871.750.858	95%
3	2020	1.017.061.795.452	947.824.890.407	93%
4	2021	1.064.990.890.165	1.057.787.974.513	99%
5	2022	1.116.451.228.327	1.494.739.533.955	134%

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Pada tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa meskipun ada fluktuasi, tahun 2022 mencatat kinerja keuangan yang sangat tinggi, dimana pada tahun 2022 mencatat peningkatan yang signifikan dalam anggaran menjadi 1.116.451.228.327 rupiah, dan realisasi yang sangat tinggi sebesar 1.494.739.533.955 rupiah, menghasilkan kinerja keuangan sebesar 134%. Ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam mengumpulkan pendapatan daerah pada tahun tersebut yang disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan atau perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

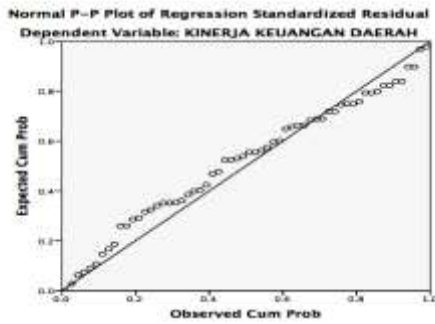
Pada tahun 2020, terjadi perubahan pada anggaran keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Anggaran tersebut mencapai sebesar 1.017.061.795.452 rupiah, namun realisasi yang tercapai hanya sebesar 947.824.890.407 rupiah, menghasilkan kinerja keuangan sebesar 93%. Terdapat penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam konteks ini, angka kinerja keuangan sebesar 93% menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran awal untuk tahun tersebut. Penurunan yang lebih signifikan ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

C. Hasil Uji Statistik

Uji Asumsi Klasik adalah serangkaian tes statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu model regresi linier memenuhi asumsi yang mendasar (Sugiyono, 2019).

1. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2019), uji normalitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang dimiliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Gambar 1. Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan dari gambar grafik normal probability plot di atas, terlihat bahwa titik-titik yang mewakili data residu tersebar secara merata sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis diagonal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang akan dibentuk memiliki residu yang terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Dalam mengidentifikasi adanya masalah multikolinearitas, kita dapat melihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Anggaran	.563	1.214
Realisasi	.563	1.214

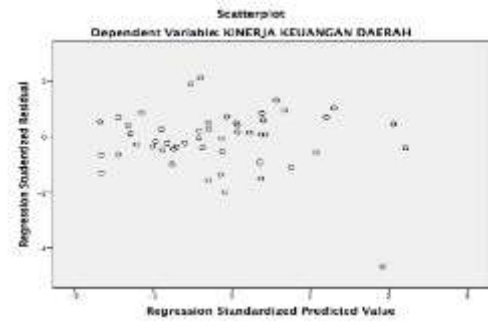
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa keempat variabel independen memiliki nilai VIF yang berada di bawah batas yang ditetapkan yaitu 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut saling mandiri dan tidak memiliki korelasi yang kuat satu sama lain. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan model regresi ini dengan keyakinan bahwa tidak akan ada masalah multikolinearitas yang mempengaruhi hasil analisis.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar berikut ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas:



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dalam distribusi residual. Titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tersebut, variansi residual antara pengamatan-pengamatan berbeda tetap konstan atau homogen. Berdasarkan temuan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa asumsi ketiadaan heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas telah terpenuhi dalam persamaan regresi ini. Dengan kata lain, variabilitas dari kesalahan prediksi tidak bergantung pada nilai-nilai prediktor.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen (variabel respon) dengan dua atau lebih variabel independen (variabel prediktor) (Sugiyono, 2019). Tujuan utama dari regresi berganda adalah untuk membantu memahami sejauh mana variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Koefesien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	2.563	6.021			2.223	.006		
Anggaran	1.452	.087	.762		7.386	.000	.563	1.214
Realisasi	1.764	.112	.802		4.214	.000	.563	1.214

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.563 + 1.452 (X_1) + 1.764 (X_2),$$
 persamaan dari analisis regresi berganda yang tersaji di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 2,563 menunjukkan rata-rata rasio Kinerja Keuangan jika Anggaran dan Realisasi bernilai nol.
- b) Koefisien regresi untuk variabel Anggaran sebesar 1.452 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara anggaran dan kinerja keuangan. Artinya, jika nilai anggaran meningkat satu unit, maka diharapkan nilai kinerja keuangan akan meningkat sebesar 1.452 satuan.
- c) Koefisien regresi untuk variabel Realisasi (X2) adalah 1.764 yang menunjukkan besar perubahan rata-rata rasio Kinerja Keuangan yang dipengaruhi oleh Realisasi. Jika nilai Realisasi meningkat sebesar satu unit, maka kinerja keuangan diharapkan akan meningkat sebesar 1.764 satuan, dengan asumsi semua faktor lainnya tetap konstan.

5. Analisis Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.752 ^a	.747	.714
a. Predictors: (Constant), Realisasi, Anggaran			
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah			

Berdasarkan output SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.747. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 74.7% variasi dari kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi yang terjadi pada kedua variabel independen, yaitu Anggaran dan Realisasi. Dengan kata lain, hampir tiga perempat dari seluruh variasi dalam kinerja keuangan dapat diatribusikan kepada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam model regresi ini. Namun, sisanya sebesar 25.3% masih belum dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut dan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam analisis.

D. Hasil Uji Hipotesis

Metode umum yang digunakan dalam uji parsial termasuk t-test dan p-value. Dengan menggunakan nilai t-statistik, kita dapat menentukan apakah koefisien regresi dari

setiap variabel independen secara individual berbeda secara signifikan dari nol atau tidak.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	2.563	6.021			2.223	.006		
Anggaran	1.452	.087	.762		7.386	.000	.563	1.214
Realisasi	1.764	.112	.802		4.214	.000	.563	1.214

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2	1729.323		
1 Residual	57	33.456	70.135	.000 ^b
Total	59			

Dari tabel yang diberikan, ditemukan nilai Fhitung sebesar 70.135. Dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha=0.05$ (5%) dan derajat kebebasan $df_1=k=2$ serta $df_2=n-(k+1)=60-(2+1)=57$, maka kita mendapatkan nilai Ftabel sebesar 3.354. Berdasarkan dari perbandingan antara nilai Fhitung dan Ftabel ($70.135 > 3.354$), serta melihat dari nilai signifikansi dimana $\text{sig.}=0.000 < \alpha=0.05$ (5%), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Anggaran dan Realisasi secara simultan terhadap Kinerja Keuangan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dianalisis pada paragraf sebelumnya maka dapat dibuat pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada analisis pengaruh Anggaran terhadap Kinerja Keuangan diperoleh bahwa nilai t-hitung sebesar 7,386 dengan nilai sig. sebesar $0.000 > \alpha=0.05$ (5%) sehingga berada dalam daerah penerimaan H₀, artinya Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, berarti hipotesis pertama diterima. Hal Ini menunjukkan bahwa adanya anggaran yang baik atau peningkatan dalam pengelolaan anggaran dapat berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah Kab. Sumbawa Barat (KSB), dimana semakin efektif anggaran yang dikelola, maka semakin baik kinerja keuangan yang dapat dicapai oleh pemerintah KSB. Dengan mengelola anggaran dengan baik, pemerintah KSB dapat memaksimalkan alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Hal ini mendukung teori Brigham (2018) yang

menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2. Berdasarkan pada analisis pengaruh Realisasi terhadap Kinerja Keuangan daerah diperoleh bahwa nilai t -hitung sebesar 4,214 dengan nilai sig. sebesar $0.000 > \alpha = 0.05$ (5%) sehingga berada dalam daerah penerimaan H_0 , artinya Realisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, berarti hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pencapaian target atau realisasi yang baik dalam pengelolaan anggaran dan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Khusaini (2018), yang menekankan pentingnya mencapai realisasi anggaran yang baik dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.
3. Berdasarkan perbandingan antara nilai F -hitung dan F -tabel ($70.135 > 3.354$), serta melihat dari nilai signifikansi dimana $\text{sig.} = 0.000 < \alpha = 0.05$ (5%), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Anggaran dan Realisasi secara simultan terhadap Kinerja Keuangan dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa ketika Anggaran dan Realisasi dihubungkan secara bersama-sama dalam analisis, keduanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan atau organisasi. Hasil penelitian ini mendukung temuan dalam penelitian Mauro (2019) dan Thompson (2020) yang menyatakan kesimpulan bahwa pengaruh yang signifikan antara Anggaran dan Realisasi terhadap Kinerja Keuangan adalah temuan yang konsisten dalam berbagai penelitian, dan hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hubungan tersebut relevan dan dapat diandalkan dalam konteks keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Terdapat penurunan pendapatan pada tahun 2019 dan 2020, namun diikuti oleh pertumbuhan yang kuat pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, terjadi realisasi pendapatan tertinggi hampir mencapai 1.495 triliun rupiah, menandakan upaya untuk peningkatan pendapatan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2020 sekitar 947,8 triliun rupiah karena pengaruh kondisi ekonomi sulit akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan kebijakan, pertumbuhan ekonomi, dan struktur pendapatan daerah dapat memengaruhi fluktuasi dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tersebut.
2. Kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2022 mencatat kinerja keuangan yang sangat tinggi, dengan peningkatan signifikan dalam anggaran hingga 1.116.451.228.327 Rupiah dan realisasi yang sangat tinggi mencapai 1.494.739.533.955 rupiah, menghasilkan kinerja keuangan sebesar 134%. Ini juga menunjukkan pencapaian luar biasa dalam pengumpulan pendapatan daerah, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan pendapatan ataupun perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian pada tahun 2020, terjadi perubahan dalam anggaran keuangan daerah dengan anggaran sebesar 1.017.061.795.452 rupiah, tetapi realisasi hanya mencapai 947.824.890.407 rupiah, menghasilkan kinerja keuangan sebesar 93%. Terdapat penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja keuangan sebesar 93% menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran awal untuk tahun tersebut. Penurunan ini disebabkan

oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda daerah tersebut.

3. Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Anggaran dan Realisasi secara simultan terhadap Kinerja Keuangan dalam penelitian ini. Dalam kata lain, hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Anggaran dan Realisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2018-2022.

B. Saran

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan beragam sumber pendapatan daerah selain anggaran, seperti pengembangan potensi ekonomi lokal atau meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada anggaran saja seperti memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi sejauh mana realisasi anggaran di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam mempengaruhi kinerja keuangan selama periode yang ditentukan. Dalam hal ini, analisis dapat dilakukan terkait tingkat pencapaian target realisasi, efisiensi penggunaan dana publik, serta dampaknya pada pencapaian tujuan pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan referensi oleh pemerintah KSB dalam membangun daerahnya.
3. Hasil penelitian ini dapat memperkuat pengawasan terhadap realisasi anggaran secara berkala, dimana pengawasan realisasi anggaran dengan cermat, pemerintah dapat mengidentifikasi perbedaan antara target dan pencapaian yang sebenarnya lebih awal, sehingga dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat waktu serta melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap program dan proyek yang didanai oleh anggaran. Hal ini akan membantu memastikan bahwa dana anggaran

digunakan dengan efisien dan efektif, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Halim. dan Syam, Kusufi. (2017). Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Akbar, D.S. (2018). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 6 (1): 36-44.
- Ariani, N. W., & Putri, N. D. (2016). Pengaruh anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada kabupaten/kota di Bali). *Jurnal Akuntansi & Bisnis Universitas Udayana*, 12(2), 149-166.
- Bastian, Indra. (2016). Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham, E.F., & Houston, J.F. (2018). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Brown, M., & Davis, C. (2019). Examining the Relationship between Income Budgeting and Financial Performance in Local Governments. *Public Administration Review*, 35(4), 123-140.
- Dedy Aries Poae, David P. E. Saerang. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1*, Juni 2013.
- Djayasinga, Marselina. (2015). *Membedah APBD*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gitman, L.J., & Zutter, C.J. (2019). *Principles of Managerial Finance*. Pearson Education.
- Gunawan, Dimas Rizky. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8 (1) (2016).
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Services.
- Irham, Fahmi. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

- Ismail, N. (2019). Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Gorontalo Law Review*, 2 (1): 24-32. Jakarta: Legalitas.
- Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khodacheck, I. dan Timoshinko, K. (2017). Russian Central Government Budgeting and Public Sector Reform Discourses: Paradigms, hybrids, and a "Third Way". *International Journal of Public Administration*, 41 (5-6): 460-477.
- Khusaini. (2018). Keuangan Daerah. Malang: UB Press.
- Kuswandi, A. (2016). Manajemen Pemerintah Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam 45.
- Lee, S., & Park, H. (2021). The Influence of Actual Revenue Generation on Financial Performance: Evidence from Municipalities in South Korea. *International Journal of Public Administration Research and Theory*, 42(1), 89-105.
- Lukito Penny Kusumastuti. (2014). Membedakan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Marlina, M. (2018). Pengaruh anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi Universitas Sriwijaya*, 16(1), 1-16.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, dan Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sumbawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 31(2), 190-199.
- Mauro, S.G., Cinquini, L. dan Sinervo, L.M. (2019). Actors Dynamics Toward Performed Based Budgeting: A Mix of Change and Stability?. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(2), 158-177.
- Nafarin, M. (2015). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Natalia, S., Irina, O. dan Yuriy, H. (2019). The Managerial Issues of State Budgets Execution: The Case of Ukraine and Kazakhstan. *Polish Journal of Management Studies*, 19 (1): 445-463.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Ridwan, A. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Ross, S.A., Westerfield, R.W., & Jordan B.D. (2020). Essentials of Corporate Finance. McGraw-Hill Education.
- Santoso, Singgih. (2012). Panduan Lengkap SPSS Versi 20. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sasongko dan Parulian. (2015). Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, B. (2018). Manajemen Keuangan Daerah: Konsep dan Praktik. Penerbit Maju Jaya.
- Smith, J., & Johnson, A. (2018). The Impact of Revenue Budgeting and Revenue Realization on Financial Performance. *Journal of Finance and Accounting*, 45(2), 67-82.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, A. (2020). Pengaruh Anggaran Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah. Jurnal Keuangan Publik, 7(2), 123-136.

Thompson, R., & Williams, E. (2020). Analyzing the Effects of Revenue Projection Accuracy on Financial Performance: A Case Study of County Government Finances. *Journal of Public Finance and Policy Analysis*, 28(3), 56-73.